

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun dan Judul	Hasil Penelitian
1	RYANTI TIBALLA	2017 Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan (BUMDes) DiDesa Swarga Bara	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan meskipun belum optimal, seperti pada tahap perencanaan dan evaluasi dimana partisipasi masyarakat masih terbatas

Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun dan Judul	Hasil Penelitian
		Kabupaten Kutai Timur	pada partisipasi tidak langsung atau melalui perwakilan. Serta pelaksanaan program masih terfokus di Dusun Kabo Jaya dan belum menyebar ke Dusun-Dusun yang lain. Adapun faktor yang menjadi penghambat yaitu faktor kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajibannya dalam pelaksanaan program Bumdes serta masih minimnya sosialisasi yang diberikan oleh pengurus Bumdes terkait dengan program Bumdes menyebabkan belum berjalannya program Bumdes seperti yang diharapkan oleh masyarakat pengurus Bumdes menyebabkan belum berjalannya program Bumdes seperti yang diharapkan oleh masyarakat
2	TEUKU SULTHAN ALFARUQ	2022 Peran Masyarakat	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran masyarakat secara umum

Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun dan Judul	Hasil Penelitian
	MUDALANGA	Terhadap Kemajuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Berjaya Menurut Perspektif Islam Desa Meunasah Krueng	berkontribusi dengan baik, hal ini selaras dengan konsep Islam dalam bermasyarakat yaitu konsep Ta'awun (tolong-menolong) dan pentingnya musyawarah. Implementasi program BUMDES Maju Berjaya di desa Meunasah Krueng yang terdiri dari beberapa unit yang telah berjalan dengan baik seperti sewa teratak, ternak sapi, sewa ruko. Faktor pendukung pada kemajuan adalah pengelolaan program yang dijalankan oleh masyarakat yang kompeten terhadap program yang dijalankan. Kemudian untuk faktor penghambat terletak pada fasilitas operasional yang masih kurang dan juga faktor non teknis seperti adanya wabah PMK yang mengganggu kesehatan sapi dan masih ada masyarakat yang kurang kooperatif dalam mengembalikan dana pinjaman

Sumber : Data diolah ,2024

B. Tinjauan Teoritis

1. Peran Masyarakat

a. Pengertian Peran

Peran menurut tata bahasa, peran berasal dari kata "*participate*", yang berarti "berpartisipasi, peran serta". Peran berarti apa yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu posisi dalam masyarakat. Sedangkan serta artinya bergabung atau berpartisipasi. Dengan kata lain, peran adalah perhatian dan partisipasi seseorang terhadap sesuatu yang bersifat fisik atau non fisik. Maksud dari partisipasi disini adalah suatu bentuk minat yang melibatkan masyarakat yang tertarik dengan bentuk fisik dan non fisik dari BUMDES Pandu Berjaya.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai proses (Soerjono Soekanto, 2003:243)

Menurut Yusufhadi Miarso (2004:706), yang dimaksud dengan "peran" adalah keikutsertaan secara spontan berupa pikiran, tenaga,

barang atau uang, disertai tanggung jawab untuk kepentingan kelompok guna mencapai tujuan.

Menurut Abdulsyani (2007:94), peran adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam rangkaian menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan (status) yang dimilikinya. Apakah seseorang melaksanakan hak kewajibannya sesuai dengan status sosialnya, maka hal ini dapat dikatakan individu tersebut menjalankan suatu peran. Jika seorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan dimasyarakat, maka terdapat kecenderungan mengenai adanya suatu harapanharapan baru.

Menurut Kozier Barbar (Dalam Rusmawati:2013), peran adalah seperangkat tinggkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang demi kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan social baik dari dalam maupun dari seseorang pada situasi social tertentu.

Menurut Horton dan Hunt (1993; 129-130), peran (*role*) adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada suatu status ini oleh Merton (1968) dinamakan perangkat peran (*role set*).

Menurut Soejono Soekanto (2002:441), unsur-unsur peranan atau *role* adalah:

1. Aspek dinamis dari kedudukan
2. Perangkat hak-hak dan kewajiban
3. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan

4. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang

Sedangkan menurut Paul B.Horton dan Chester L.Hunt (Sosiologi Jilid 1 1996:118) peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang atau kelompok yang memiliki status tertentu. Jadi setiap peranan bertujuan agar individu yang melaksanakan peranan tersebut dengan orang-orang sekitarnya tersangkut atau ada hubungannya dengan peranan tersebut, terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai social yang diterima dan di taati kedua belah pihak

Dari definisi para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah: “seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam rangkaian menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan (status) yang dimilikinya”.

b. Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan istilah yang sangat sering digunakan untuk menyebut kesatuan manusia yang berasal dari bahasa arab yaitu sharak yang berarti partisipasi, partisipasi, yang kemudian menjelma menjadi masyarakat dalam bahasa Indonesia.

Beberapa definisi dari masyarakat itu sendiri berdasarkan sudut pandang beberapa ahli antara lain:

a. Soetomo (2018)

masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang berpola, terorganisasi.

- b. Koentjaraningrat (1994)
masyarakat “adalah sekumpulan manusia saling “bergaul” atau dengan istilah ilmiah “berinteraksi”.
- c. Poerwadarminto (1996) dalam Rodliyah (2013:32)
masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
- d. Suparlan (1990) dalam Rodliyah (2013:32)
masyarakat dapat diartikan sebagai sekumpulan dari sejumlah orang dalam suatu tempat tertentu yang menunjukkan adanya pemilik norma-norma hidup bersama walaupun di dalamnya terdapat berbagai lapisan antara lain lingkungan sosial.
- e. Mac Iver dan Page (1961) dalam Soerjono Soekanto (2006: 22)
masyarakat ialah suatu dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia.
- f. J.L Gillin dan J. P Gillin (dalam Abdul Syani 2002 :32)
Masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang hidup bersama-sama dan berinteraksi satu sama lain pengelompokan-pengelompokan yang kecil.

c. Peran Masyarakat

Menurut Siti Rodliyah (2003: 33-34) Peran masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi serta mampu untuk meningkatkan kemampuan menerima dan kemampuan untuk menanggapi, baik secara langsung maupun tidak langsung sejak dari gagasan, perumusan kebijakan hingga pelaksanaan program. Sedang Menurut Adisasmita (2006) Peran masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan dan merupakan aktualisasi dan kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan. Dengan demikian Peran masyarakat merupakan bentuk keterlibatan masyarakat terhadap proses menganalisa masalah dan potensi yang ada di masyarakat, memilih dan mengambil keputusan tentang alternatif solusi untuk memecahkan masalah, melakukan upaya mengatasi masalah, dan keikutsertaan masyarakat terhadap proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

2. Pengelolaan BUMDes

a. Pengertian Pengelolaan

Moekijat (2000:1) pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha

yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Balderton dalam Adisasmita (2011:21) pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan Arikunto (1990:2) mengatakan bahwa pengelolaan adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan.

Dalam bahasa Inggris pengelolaan disebut "*Management*" yang artinya pimpinan, pengurusan, pengelolaan. Manajemen menurut Parker (Stoner dan Freeman 2000) seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang (*The art of getting things done through people*). Begitupun Pat Carigan dalam (Chuck Williams 2001:6) mengatakan bahwa manajemen yaitu menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Hampir sama seperti Parker dan Pat Carigan, Sapre (2002) menyatakan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan langsung untuk penggunaan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Usman 2013:6).

Bennis (Sharma 2009) dalam (Usman 2013:11) *management is getting people to do what needs to be done*, manajemen adalah menghasilkan karyawan melaksanakan sesuatu yang dibutuhkan untuk dilakukan. Kemudian Drucker menambahkan bahwa manajemen adalah melakukan pekerjaan dengan benar.

G.R. Terry (2014:2) manajemen adalah proses yang khas yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan usaha mencapai sasaran-sasaran dengan memanfaatkan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya.

Prof. Drs. Oei Liang Lie mengutarakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan sumber daya manusia dan alam, terutama sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Sabardi 2001:4)

Dijelaskan lebih detail lagi oleh James A.F. Stoner dalam (Sabardi 2001:5-6) bahwa manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan upaya anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sehingga berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan rangkaian suatu kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan terdiri dari beberapa tahap, yakni sebagai berikut:

- 1) Tahap perencanaan

Sabardi (2001:54) perencanaan merupakan proses dasar yang

digunakan untuk memilih tujuan dengan dan cara pencapaiannya. Setiap rencana akan memberi sumbangan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan perencanaan menurut Handoko (2003) dalam (Usman 2013:77) meliputi (1) pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi, (2) penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Harold Koontz dan Cyril O'Donnell (1972:63) perencanaan ialah fungsi memilih sasaran-sasaran perusahaan serta kebijaksanaan, program-program, dan cara-cara untuk mencapainya. Perencanaan dengan sendirinya merupakan suatu pengambilan keputusan

Perencanaan dalam arti luas menurut Adisasmita (2011:22) adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sistematis maksudnya agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Lebih jelas lagi, Kamaludin (1989:6) mengutarakan bahwa perencanaan merupakan fungsi pertama dari manajemen yakni menentukan tujuan-tujuan dan cara mencapainya. Dengan demikian berdasarkan kesimpulan yang dapat ditarik dari definisi-definisi perencanaan yakni perencanaan merupakan suatu tahap atau langkah awal dalam melakukan suatu kegiatan, diawali dengan pengambilan keputusan dalam menentukan tujuan dan cara-cara mencapai tujuan tersebut.

Tujuan dari perencanaan: (1) standar pengawasan yakni mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaannya, (2) mengetahui kapan pelaksanaan dan selesai suatu kegiatan, (3) mengetahui siapa saja yang terlibat (struktur organisasinya), baik kualifikasinya maupun kualitasnya, (4) mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan, (5) meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga, dan waktu, (6) memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan, (7) menyerasikan dan memadukan beberapa subkegiatan, (8) mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui, dan (9) mengarahkan pada pencapaian tujuan.

Manfaat perencanaan yakni (1) standar pelaksanaan dan pengawasan (memfasilitasi monitoring dan evaluasi), (2) pemilihan berbagai alternatif terbaik (pedoman pengambil keputusan), (3) penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan, (4) menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi, (5) membantu manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, (6) alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait, (7) alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti, dan (8) meningkatkan kinerja (keberhasilan organisasi tergantung keberhasilan perencanaannya).

2) Tahap Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya bahan yang dimiliki organisasi. Handoko

(2003) dalam (Usman 2013:170) pengorganisasian adalah penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Handoko juga menyebutkan bahwa bagaimana organisasi mengelompokkan kegiatannya, di mana setiap pengelompokan diikuti penugasan seorang manajer yang diberi wewenang mengawasi anggota kelompok. Ernest Dale dalam (Sabardi 2001:86-88) menguraikan pengorganisasian sebagai suatu proses multistep, yakni:

- a) Pemerincian pekerjaan, memerinci seluruh pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi
 - b) Pembagian pekerjaan, membagi beban kerja ke dalam aktivitas-aktivitas yang secara logis dapat menyenangkan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang
 - c) Pemisahan pekerjaan, mengkombinasikan pekerjaan anggota perusahaan dalam cara yang logis dan efisien
 - d) Koordinasi pekerjaan, menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasi pekerjaan-pekerjaan anggota organisasi dalam satu kesatuan yang harmonis
 - e) Monitoring dan reorganisasi, memonitor efektivitas organisasi dan pengambilan langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas
- 3) Tahap pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan pengaturan aktivitas-aktivitas

organisasi agar elemen-elemen pekerjaan yang menjadi target tetap berada pada batas-batas yang dapat diterima. Tanpa pengaturan ini organisasi tidak memiliki petunjuk tentang seberapa baik kinerja mereka dalam kaitannya dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (Usman 2013:68). Pengawasan berfungsi agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana (Harold Koontz dan Cyril O'Donnell 1972:66). Sedangkan Sabardi (2001:210) mengemukakan bahwa pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan pengukuran dan koreksi semua kegiatan dalam rangka memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana-rencana organisasi dapat terlaksana dengan baik.

b. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Badan Usaha Milik Desa, yang sering disingkat dengan “BUMDES” adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015. BUM Desa merupakan kelembagaan sosial-ekonomi yang terpisah dari pemerintah desa. BUMDES merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan pemerintah desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk.

Berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes dibentuk untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, dan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Badan usaha ini dibentuk untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, dan potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan desa, BUMDes dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

Dengan demikian, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa merupakan badan usaha desa yang dimiliki oleh desa yang keberadaannya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dengan memanfaatkan potensi desa dan sumber daya manusia desa.

Manfaat dikembangkannya BUMDes antara lain:

- 1) Sumber Pendapatan Desa. BUMDes dapat menjadi sumber pendapatan desa yang dapat menyumbang kesejahteraan desa dan masyarakatnya. Hal ini dapat terjadi terutama jika BUMDes dikembangkan dengan sistem kepemilikan bersama.
- 2) Menjadi Aset Desa BUMDes dapat menjadi salah satu aset desa yang berwujud lembaga ekonomi. Desa dapat belajar mengembangkan kelembagaan ekonomi melalui BUMDes.
- 3) Kepercayaan Melalui BUMDes, Desa dapat bekerjasama dengan pihak lain dan ini dapat meningkatkan kepercayaan pihak lain terhadap desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang dimaksud kebutuhan dan potensi desa, yakni:

- 1) Kebutuhan masyarakat utama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - 2) Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar;
 - 3) Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
 - 4) Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonom warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
- Badan usaha desa ini merupakan roda perekonomian desa yang didirikan atas inisiatif masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat.

Ada tujuh ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- 1) Badan Usaha ini dimiliki oleh desa dan di kelola secara bersama;
- 2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- 3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom);
- 4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- 5) Keuntungan yang diperoleh ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyertaan modal) dan modal masyarakat melalui kebijakan village (village policy);
- 6) Difasilitasi oleh pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
- 7) Pelaksanaan operasionalisasi di kontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota);

Dalam mendirikan BUMDes, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh desa, yakni:

- 1) Inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa;
- 2) Potensi usaha ekonomi desa;
- 3) Sumberdaya alam di desa;
- 4) Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDes, dan;
- 5) Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

Sebelum mendirikan BUMDes, terdapat prinsip-prinsip BUMDes yang harus dipahami, yakni:

- 1) Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- 3) Emansipatif, semua komponen terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- 4) Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 5) Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- 6) Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Cara pendirian BUMDes yakni (1) pendirian BUM Desa berdasar pada Perda Kabupaten, (2) Diatur berdasarkan Perdes, (3) Satu Desa, hanya terdapat satu BUMDes, (4) Pemkab memfasilitasi pendirian BUMDes, (5) BUMDes dapat didirikan dalam bentuk Usaha Bersama (UB) atau bentuk lainnya, tetapi bukan koperasi, PT, Badan Usaha Milik Daerah, CV atau lembaga keuangan (BPR).

Berikut ini adalah karakteristik dari BUMDesa: 1. Berbentuk Badan Hukum 2. Berusaha di bidang perekonomian (jasa, manufaktur, dan perdagangan) 3. Modal terdiri dari penyertaan pemdes dan penyertaan masyarakat dengan perbandingan 51% dan 49% 4. Menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat Desa.

3. Peran Masyarakat dalam Pengelolaan BUMDes

Dalam melakukan pengelolaan BUMDes peran masyarakat benar-benar sangat diperlukan bagi peningkatan perekonomian desa serta menumbuhkan tingkat kerja sama dan membentuk program yang baik. Dengan kata lain peran masyarakat merupakan sebuah kegiatan aktivitas yang mampu menumbuhkan rasa emosional dan tindakan seseorang untuk ikut serta pada sebuah lembaga BUMDes, yang mana masyarakat desa tentunya akan berkontribusi terhadap kegiatan yang dilakukan maupun program dan mematuhi ketentuan kebijaksanaan yang telah dirancang oleh pemerintah. Menurut Cohen dan Uphoff (dalam Irene, 2015:61,) mengemukakan bahwa peran masyarakat dalam pengelolaan program meliputi:

1) Peran dalam pengambilan keputusan

Masyarakat dilibatkan dalam perumusan atau proses pembuatan keputusan dengan mengemukakan pendapat atau saran dalam menilai suatu program/kebijakan yang akan ditetapkan. Dengan demikian, keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan di desa, tercermin dari : a) Keikutsertaan masyarakat dalam menghadiri rapat perencanaan BUMDes. b) Mengemukakan pendapat atau saran dalam

setiap pertemuan/rapat. c) Memberikan data atau informasi dalam setiap pertemuan atau rapat BUMDes. d) Keikutsertaan masyarakat dalam proses atau perumusan pembuatan keputusan

2) Peran dalam pelaksanaan

Peran dalam pelaksanaan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan BUMDes. Peran dalam pelaksanaan ini dapat berupa saling membantu dalam pendanaan berwujud kontribusi uang, berperan dalam administrasi berupa tenaga, mengatur (mengontrol) dan penguraian program. Peran pada bidang ini sebagai bentuk kelanjutan dalam rencana yang sudah dibentuk pada saat itu termasuk bidang perencanaan, pelaksanaan serta tujuan.

3) Peran dalam pengambilan manfaat

Peran dalam pengambilan manfaat merupakan wujud peran dimana dalam keikutsertaan tersebut dapat memberikan manfaat lebih atau mendapat pengaruh positif bagi pemerintah dan masyarakat. Peran ini tidak lepas dari kuantitas dan kualitas dari hasil pelaksanaan sebuah program yang sudah dicapai. Dari segi kuantitas, akan dilihat melalui presentase keberhasilan program yang dilaksanakan, akankah berhasil sesuai target yang sudah ditetapkan atau tidak. Sedangkan dari segi kualitas dinilai berhasil jika suatu program akan ditandainya dengan peningkatan atau output.

4) Peran dalam evaluasi.

Peran dalam evaluasi atau keikutsertaan dalam evaluasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi dan menilai.

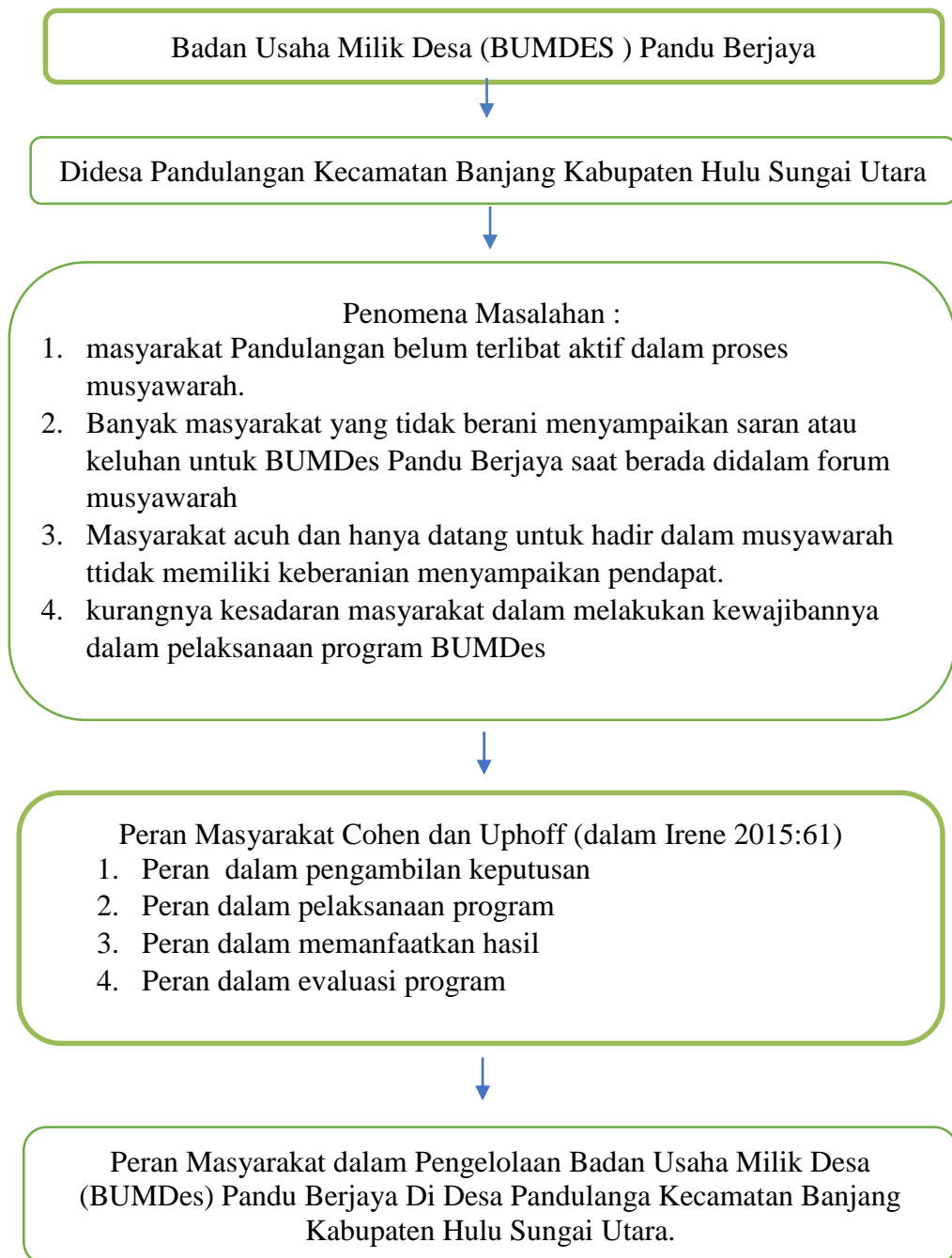
pelaksanaan hasil-hasil perencanaan. Masyarakat dapat memberikan saran dan kritik terhadap pelaksanaan pemerintahan agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan mencapai hasil yang ditetapkan. Perani jenis ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Peran ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir menurut (Sugiyono, 2010) merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen.

Dalam penelitian ini, peneliti hendak membatasi penelitian pada Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pandu Berjaya Di Desa Pandulangan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hal ini penting menurut peniliti sebab melihat Penomena Masalahan Desa Pandulangan masyarakat Pandulangan belum terlibat aktif dalam proses musyawarah , tidak berani menyampaikan saran, acuh, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajibannya .Dalam kajian ini, peneliti hendak menggunakan teori dari Cohen dan Uphoff (dalam Irene 2015:61) tentang Peran masyarakat.

Adapun kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Data Diolah, 2024